

Desain Dakwah Pemberdayaan Masyarakat melalui Ekowisata Bahari di Kawasan Pantai Banongan Situbondo

AKHMAD ZAINI, SAMSUL ARIFIN

Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAI Ibrahimiy Situbondo, Indonesia
goessyam@gmail.com

Abstract: One effort is the optimal utilization of local resources is to develop tourism with ecotourism concept. Ecotourism is developed in Situbondo Banongan Coast community involvement, economic benefit, and should pay attention to the values of the local community's wisdom filled with religious values. Thus, improving the quality of life through economic empowerment propaganda is very significant. The focus of this paper is the design of economic empowerment through the propaganda for marine ecotourism in Central Coast communities Banongan Situbondo. This research using a community service-based approach of Participatory Rural Appraisal (PRA). Results of this research are there are two steps that need to be done preaching empowerment, which is an addition to the insight and understanding of the community (such as ecotourism *halaqah*, *halaqah* entrepreneurship, and *halaqah* practical fiqh) and da'wah action (and deversikasi cooperative optimization efforts).

Keywords: da'wah, ecotourism, empowerment.

Pendahuluan

Pemerintah Kabupaten Situbondo, melalui Perusahaan Daerah (Perusda) Banongan, mulai tiga tahun yang lalu mengembangkan ekowisata bahari. Ekowisata bahari tersebut merupakan salah satu program unggulan Perusda Banongan. Perusda Banongan, sesuai dengan Perda No 2 Tahun 1971 *junto* Perda No 14 Tahun 1985, yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya, dalam usaha memenuhi kebutuhan rakyat, menimbulkan gairah kerja, memperluas lapangan kerja, mempertinggi

kecakapan dan ketrampilan kerja, menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Secara konseptual ekowisata berarti sebagai suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya, sehingga memberikan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat sekitarnya. Kalau dilihat dari segi pengelolaannya, ekowisata mengandung pengertian sebagai penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab di beberapa tempat alami dan atau daerah-daerah yang dibuat berdasarkan kaidah alam dan secara ekonomi berkelanjutan yang mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sementara itu, menurut Permendagri No 33 tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

Pembangunan ekonomi daerah yang kuat dan berkelanjutan merupakan sebuah kolaborasi yang efektif antara pemanfaatan sumberdaya yang ada, masyarakat, dan pemerintah. Dalam konteks ini, pemerintah sebagai regulator berperan strategis dalam mengupayakan kesempatan yang luas bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi penuh dalam setiap aktivitas ekonomi.

Salah satu upaya pemanfaatan sumberdaya lokal yang optimal adalah dengan mengembangkan pariwisata dengan konsep ekowisata. Dalam konteks ini wisata yang dilakukan memiliki bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya-upaya konservasi, pemberdayaan ekonomi lokal dan mendorong respek yang lebih tinggi terhadap perbedaan kultur atau budaya. Hal inilah yang mendasari perbedaan antara konsep ekowisata dengan model wisata konvensional yang telah ada sebelumnya. Secara sederhana, konsep ekowisata menghubungkan antara perjalanan wisata alam yang memiliki visi dan misi konservasi dan kecintaan lingkungan. Hal ini dapat terjadi karena keuntungan finansial yang didapat dari biaya perjalanan wisata digunakan juga untuk kebutuhan konservasi alam serta perbaikan kesejahteraan penduduk lokal. Di sisi lain, konsep ekowisata juga diarahkan untuk mempertahankan kebudayaan lokal serta tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan pergerakan demografi. Pergeseran konsep kepariwisataan dunia ke model ekowisata, disebabkan karena kejenuhan wisatawan

untuk mengunjungi obyek wisata buatan. Oleh karena itu peluang ini selayaknya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menarik wisatawan asing mengunjungi objek berbasis alam dan budaya penduduk lokal.

Prinsip pengembangan ekowisata, sebagaimana dalam Permendagri No 33 tahun 2009, harus mengacu kepada kesesuaian antara jenis dan karakteristik ekowisata; konservasi; ekonomis (yaitu memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan); edukasi; memberikan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung; partisipasi masyarakat; dan kearifan lokal.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka ekowisata yang dikembangkan di Pantai Banongan Kabupaten Situondo harus melibatkan masyarakat, memberi manfaat ekonomi, dan harus memperhatikan nilai-nilai kearifan masyarakat setempat yang penuh dengan nilai-nilai keagamaan. Berdasarkan pemikiran inilah kalangan perguruan tinggi perlu mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berbentuk dakwah pemberdayaan.

Dalam istilah Khamami Zada, dakwah pemberdayaan ini bisa disebut sebagai dakwah transformatif. Dakwah transformatif merupakan model dakwah, yang tidak hanya mengandalkan dakwah verbal (konvensional) untuk memberikan materi-materi keagamaan kepada masyarakat, yang memposisikan da'i sebagai penyebar pesan-pesan keagamaan, tetapi menginternalisasikan pesan-pesan keagamaan ke dalam kehidupan riil masyarakat dengan cara melakukan pendampingan masyarakat secara langsung. Dengan demikian, dakwah tidak hanya untuk memperkuat aspek relijiusitas masyarakat, melainkan juga memperkuat basis sosial untuk mewujudkan transformasi sosial. Dengan dakwah transformatif, da'i diharapkan memiliki fungsi ganda, yakni melakukan aktivitas penyebaran materi keagamaan dan melakukan pendampingan masyarakat untuk isu-isu korupsi, lingkungan hidup, penggusuran, hak-hak perempuan, konflik antaragama, dan problem kemanusiaan lainnya.

Menurut A. Halim (2005: 15-17), ada beberapa prinsip dalam dakwah transformatif tersebut yang perlu diperhatikan. Pertama, harus berorientasi kepada kesejahteraan lahir dan batin masyarakat. Dakwah harus direncanakan sebagai usaha membenahi kehidupan sosial bersama masyarakat agar penindasan, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan terkikis habis. Kedua, sebagai upaya melakukan rekayasa sosial (*social engineering*), untuk mendapatkan suatu perubahan tatanan kehidupan sosial yang lebih baik dengan menerapkan nilai-nilai keislaman.

Menurut Khamami (2006), dakwah transformatif harus memenuhi lima indikator. Pertama, dari aspek materi dakwah; ada perubahan yang berarti; dari materi ubudiyah ke materi sosial. Dalam konteks ini, para da'i sudah mulai memperkuat materi dakwahnya pada isu-isu sosial, seperti korupsi, kemiskinan, dan penindasan. Sehingga para da'i tidak lagi hanya berkuat pada materi ukhrowi. Penyebaran Islam sosial ke masyarakat secara terus-menerus melalui dakwah merupakan cara yang paling ampuh untuk mengubah pemahaman keagamaan masyarakat, bahwa beribadah bukanya secara vertikal kepada Allah, tetapi juga secara horisontal terhadap sesama manusia. Sehingga akan terjadi suatu masyarakat yang saleh individual dan saleh sosial. Ibaratnya ibadahnya rajin, kepekaan sosialnya juga tinggi, sehingga ada keharmonisan dalam beragama secara sosial.

Dari aspek materi juga ada perubahan; dari materi dakwah yang eksklusif ke inklusif. Para da'i tidak lagi menyampaikan materi dakwah yang memojokkan atau memusuhi non muslim. Kecenderungan selama ini para da'i sering menyampaikan dakwah yang bernada permusuhan terhadap agama lain. Padahal cara ini justru membuat masyarakat ikut memusuhi agama lain hanya karena agamanya yang berbeda. Karena itulah, dakwah sudah mulai diarahkan pada paradigma beragama yang toleran dan inklusif. Paradigma ini telah menjadi semangat teologi al-Qur'an bahwa Islam bukanlah agama yang memusuhi umat lain, hanya karena berbeda agamanya. "*Kalimatun sawa*" (titik temu yang sama) antar berbagai agama yang sudah digambarkan dalam al-Qur'an menjadi kata kunci dalam dakwah transformatif.

Kedua, dari aspek metodologi terjadi perubahan; dari model monolog ke dialog. Para da'i sudah berubah cara penyampaian dakwahnya, tidak lagi menggunakan pendekatan monolog, melainkan sudah melakukan dialog langsung dengan jama'ah. Sehingga problem yang dihadapi masyarakat dapat langsung dicarikan solusinya oleh da'i dengan kemampuan yang dimilikinya. Dakwah yang menggunakan pendekatan monolog cenderung melakukan indoktrinasi kepada jamaah. Padahal, Islam tidak hanya indoktrinasi, melainkan juga pencerahan terhadap jamaah. Dakwah dengan model dialog inilah yang akan memancing keaktifan jamaah untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial dalam dimensi keagamaan. Jika yang dilakukan hanya melulu pengajian monolog, tanpa adanya umpan balik dari jamaah, maka yang terjadi adalah sekadar menghilangkan dahaga spiritual, bukan melakukan perubahan pemahaman, sikap dan perilaku sosial. Dakwah

dengan model dialog dilakukan dalam rangka mencapai cita-cita dakwah transformatif.

Ketiga, menggunakan institusi yang bisa diajak bersama dalam aksi. Para da'i mesti menggunakan institusi sebagai basis gerakan agar apa yang dilakukannya mendapatkan legitimasi yang lebih kuat. Dalam kerja-kerja transformasi, agenda perubahan biasanya didukung oleh basis massa atau institusi yang pada gilirannya akan digunakan sebagai perangkat kerja perubahan. Maka, dalam dakwah transformatif, institusi merupakan indikator penting untuk memuluskan jalan perubahan. Kekuatan kerja dakwah transformatif, bukan saja secara individual pada diri sang da'i, tetapi juga basis institusional yang dimilikinya, sehingga bargaining position (posisi tawar) terhadap negara, pelaku pasar, dan masyarakat bisa didapat relatif lebih mudah. Tanpa institusi yang menjadi pendukung, da'i transformatif akan kesulitan untuk melakukan aksi terhadap stakeholder-stakholder yang ada di sekitarnya.

Keempat, ada wujud keberpihakan pada *mustad'afin*. Para da'i terketuk hatinya untuk melakukan usaha-usaha sosial untuk kepentingan kaum tertindas di daerahnya semisal kasus penggusuran tanah, pencemaran lingkungan, nasib nelayan dan petani. Rasa empati sosial merupakan prasyarat bagi da'i yang menggunakan pendekatan transformatif. Rasa empati sosial terutama ditujukan pada si korban, baik itu korban penggusuran, korban penindasan, korban permainan ekonomi, korban konflik, dan masih banyak lagi. Empati terhadap korban menjadi modal dasar untuk melakukan langkah strategis untuk membantu para korban penindasan, kemiskinan, dan permainan politik.

Kelima, para da'i melakukan advokasi dan pengorganisasian masyarakat terhadap suatu kasus yang terjadi di daerahnya agar nasib para petani, nelayan, buruh, dan kaum tertindas lainnya didampingi. Inilah puncak dari para da'i yang menggunakan pendekatan transformatif. Hasil akhir dari dakwah transformatif adalah mencetak para da'i yang mampu melakukan pendampingan terhadap problem-problem sosial yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks inilah, penyebaran dakwah di masyarakat mesti dilandasi oleh visi yang benar tentang perdamaian, kesalehan sosial, dan sesuai dengan cita-cita agama yang mendorong pada perubahan ekspresi beragama yang inklusif dan toleran. Di sinilah, para aktivis dakwah (da'i) memiliki peran yang strategis dalam merubah pandangan keagamaan masyarakat. Sebab, pemahaman keagamaan masyarakat biasanya sangat dipengaruhi oleh para da'i.

Sedangkan menurut Sarah Hlupelkile Longwe (1991) konsep pemberdayaan perempuan memiliki lima dimensi. Pertama, kesejahteraan. Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan material rakyat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar; seperti makanan, penghasilan, perumahan, dan kesehatan. Kedua, akses. Pemberdayaan dalam hal ini berarti dipahaminya untuk mendorong rakyat melakukan tindakan untuk mengubahnya dengan cara memperoleh akses yang lebih besar terhadap sumber daya atau bahkan mampu menguasai akses tersebut.

Ketiga, kesadaran kritis. Pemberdayaan di tingkat ini, berarti penumbuhan sikap kritis dan penolakan terhadap cara pandang bahwa subordinasi terhadap perempuan bukanlah pengaturan alamiah tetapi merupakan hasil dari sistem diskriminatif dari tatanan sosial yang berlaku. Keempat, partisipasi. Pemberdayaan pada level ini adalah upaya pengorganisasian rakyat, sehingga mereka dapat berperan serta dalam setiap proses pengambilan keputusan sehingga kepentingan mereka tidak terabaikan. Kelima, kuasa. Pemberdayaan dalam tingkatan ini, merupakan upaya untuk menguatkan organisasi rakyat sehingga mereka mampu mengimbangi kekuasaan kelas atas dan mampu mewujudkan aspirasi mereka karena mereka ikut memegang kendali atas sumber daya yang ada (Wardah Hafidz dan Wiladi, 1999: 17-19).

Fokus tulisan adalah desain dakwah pemberdayaan ekonomi melalui ekowisata bahari untuk masyarakat di Kawasan Pantai Banongan Kabupaten Situbondo. Ada dua langkah dakwah pemberdayaan yang dapat dilakukan, yaitu bersifat penambah wawasan dan pemahaman masyarakat (seperti *halaqah* ekowisata, *halaqah* kewirausahaan, dan *halaqah* fiqh praktis) dan dakwah tindakan nyata (optimalisasi koperasi, pemanfaatan, dan lahan deversikasi usaha).

Pemilihan kawasan Pantai Banongan Kabupaten Situbondo dalam program pengabdian kepada masyarakat ini, atas beberapa pertimbangan; antara lain: Pertama, masyarakat Pantai Banongan sangat potensial secara ekonomi untuk dikembangkan. Apalagi di kawasan tersebut mulai dikembangkan ekowisata bahari. Pantai Banongan sebagai kawasan wisata bahari selayaknya harus berbasis kepada lingkungan, kultur masyarakat setempat serta nilai-nilai keagamaan. Dengan adanya program ini masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam setiap proses, termasuk dalam proses perekonomian.

Kedua, Perusda Banongan memerlukan mitra dalam mengembangkan program ekowisata berbasis lingkungan. Di Banongan terdapat Jamaah

Sholawat Nariyah (Sonar). Dengan demikian diharapkan menguatkan interaksi sosial, terjadi sikap kepedulian, dan partisipasi masyarakat dalam program ekowisata yang digagas pemerintah daerah yang dalam hal ini Perusda Banongan.

Ketiga, penduduk Banongan tergolong miskin dan termasuk daerah “rawan”. Kawasan Banongan kurang mendapat perhatian pemerintah. Keempat, Kawasan Pantai Banongan termasuk Desa Binaan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Ibrahimy. Banongan termasuk lokasi pengabdian masyarakat para dosen dan mahasiswa Fakultas Dakwah IAI Ibrahimy. Dengan demikian, antara kami dengan masyarakat Banongan sudah terjalin komunikasi yang baik. Bahkan Jamaah Sholawat Nariyah (Sonar) penggagas dan para pembinanya berasal dari dosen Fakultas Dakwah.

Secara umum kondisi dampingan yang diharapkan masyarakat adalah keterpaduan dan keselarasan antara upaya-upaya konservasi, pemberdayaan ekonomi, dan kepedulian terhadap nilai-nilai budaya lokal. Secara khusus, pada program dakwah pemberdayaan masyarakat ini adalah upaya peningkatan perekonomian melalui ekowisata bahari yang berbasis nilai-nilai keagamaan. Secara spesifik, kondisi masyarakat yang diharapkan pada program pemberdayaan ini adalah: Pertama, optimalisasi koperasi yang dikelola Jamaah Sholawat Nariyah. Masyarakat menginginkan agar koperasi berkembang dan bagus manajemennya. Kedua, deversikasi usaha. Misalnya, keterampilan pembuatan kecap dari limbah ikan. Dengan adanya program ini kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat.

Ketiga, halaqah ekowisata berbasis lingkungan. Pada halaqah tersebut akan dibahas wisata bahari yang basis kepada lingkungan, kultur, dan nilai-nilai keagamaan masyarakat setempat. Sehingga sehingga program ekowisata di kawasan Pantai Banongan tersebut mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Keempat, halaqah kewirausahaan yang akan membahas tentang kiat-kiat menjadi wirausaha sukses dan pelatihan-pelatihan praktis. Dan kelima, halaqah fiqh praktis; yang berisi tentang problematika keagamaan masyarakat sehingga nilai-nilai keagamaan masyarakat Banongan menjadi kian kuat.

Metode

Strategi yang dapat digunakan dalam melakukan dakwah pemberdayaan ini adalah dengan menggunakan pendekatan pengabdian masyarakat berbasis *Participatory Rural Appraisal* (Daniel, 2006: 37-47;

Sukardi, 2005: 241-247). Strategi ini diharapkan data problematika masyarakat yang dijelaskan di atas (hasil studi pendahuluan) dapat ditelaah kembali, didalami bersama-sama untuk kemudian direncanakan alternatif problem solvingnya bersama masyarakat. Sehingga dapat menumbuhkan kesadaran bersama karena mereka terlibat di dalamnya, dan tim berperan hanya sebagai fasilitator.

Adapun dalam implementasinya, program ini akan dilakukan melalui beberapa cara atau metode-metode sebagai berikut: Pertama, pengenalan situasi dan membangun restu masyarakat. Kedua, melakukan pengkajian keadaan wilayah (secara umum dan topikal), yaitu melakukan pengkajian terhadap peta wilayah, keadaan sosial-ekonomi, sosial politik, sosial budaya dan rekonstruksi sejarah masyarakat Banongan secara umum. Setelah itu, dilanjutkan dengan melakukan kajian wilayah secara mendalam tentang problem sosial keagamaan masyarakat Banongan dengan cara mengkaitkan problematika dan potensi wilayah di daerah tersebut.

Ketiga, menyusun rencana aksi secara partisipatif bersama warga, yaitu merancang kegiatan sesuai dengan problem yang ditemukan dari hasil kajian wilayah bersama-sama dengan warga yang didasarkan atas kebutuhan mereka. Keempat, melaksanakan aksi, yaitu melakukan kegiatan atau upaya-upaya untuk memecahkan problem yang telah dikaji bersama-sama dengan warga dan dilakukan bersama-sama dengan warga pula.

Kelima, melakukan evaluasi dan refleksi, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi atas upaya-upaya yang telah dilakukan pada aktivitas sebelumnya untuk melihat sejauhmana efektivitas dan efesiesinya. Dan bagaimana melakukan perbaikan ulang (menyusun siklus berikutnya selama masih mungkin)

Pembahasan

Pengenalan Situasi

Pantai Banongan meliputi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Jangkar, Asembagus, dan Banyuputih. Kecamatan Jangkar memiliki luas wilayah 67,00 Km, yang terdiri dari 8 Desa dan 44 Dusun. Kecamatan Jangkar ini berpenduduk sebanyak 32. 876 jiwa. Kecamatan Asembagus mempunyai luas wilayah 118,74 Km, yang terbagi dalam 10 Desa dan 36 Dusun dengan kepadatan jumlah penduduk 45.751. Sedangkan Kecamatan Banyuputih luasnya 481,67 Km yang terdiri dari 5 desa (Desa Banyuputih, Sumberejo,

Sumberanyar, Sumberwaru, dan Wonorejo) dengan terdiri dari 27 Dusun dengan jumlah penduduk 48.839 jiwa.

Tahapan pengenalan situasi atau persiapan sosial dilakukan di Pantai Banongan, merupakan kegiatan tindak lanjut dari kegiatan identifikasi atau penjajagan awal. Kegiatan ini dilakukan melalui berbagai pertemuan untuk memperoleh persepsi yang sama. Langkah ini penting untuk mengkomunikasikan tujuan yang ingin dicapai, kegiatan yang perlu dilakukan, dana yang dibutuhkan dan siapa melakukan apa dan lain sebagainya.

Kajian Keadaan Wilayah

Dalam tahapan kajian wilayah yang paling penting tahap identifikasi. Tahap identifikasi merupakan tahap yang paling kritis dalam suatu daur kegiatan dakwah pemberdayaan. Tahap ini sangat menentukan tahapan berikutnya. Untuk itu, tahap ini perlu dipersiapkan dengan baik dan matang, yang mungkin juga perlu melibatkan tenaga ahli atau pakar untuk melakukannya. Kegiatan identifikasi pengabdian masyarakat bukanlah suatu kegiatan diskret (terpisah) melainkan kegiatan yang berlangsung terus menerus (kontinyu), bukan peristiwa satu kali jadi, melainkan suatu perkembangan adaptif untuk menemukan apa-apa yang baik dikerjakan pada tiap tahapan. Pada tahapan ini, kami melakukan:

Pertama, *analisis sosial, ekonomis, teknis, kelembagaan dan analisis lainnya sebagai langkah awal untuk identifikasi permasalahan* secara partisipatif yang melibatkan berbagai pihak yang terkena pengaruh maupun yang berpengaruh (stakeholder) baik untuk mengetahui kebutuhan, potensi dan peluang yang ada maupun permasalahan yang ada. Kami melakukan tahapan ini di masjid bersama Jamaah Sholawat Nariyah.

Kedua, *analisis pihak terkait (stakeholder analysis)* untuk menjajagi kepentingan dan pengaruh serta tingkat partisipasi pihak terkait (*stakeholder*) ini yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi jalannya kegiatan pengabdian masyarakat. Ketiga, *analisis keunggulan komparatif (comparative advantages analysis)* untuk menjajagi tingkat kelebihan dan keunggulan suatu program tertentu dibandingkan dengan program yang lain sehingga mudah dan laku di pasaran, terutama bagi Masyarakat di Banongan. Hal ini juga untuk menghindari adanya program yang serupa dan sejenis.

Keempat, *appraisal (penilaian)*. Berdasarkan kegiatan-kegiatan spesifik tersebut di atas langkah selanjutnya adalah melakukan analisis

semua hasil yang diperoleh dan melakukan appraisal (kajian mendalam) sehingga diperoleh suatu rumusan yang komprehensif.

Pemilihan kawasan Pantai Banongan Kabupaten Situbondo dalam dakwah pemberdayaan ini, atas beberapa pertimbangan, antara lain: Pertama, masyarakat Pantai Banongan sangat potensial secara ekonomi untuk dikembangkan. Apalagi di kawasan tersebut mulai dikembangkan ekowisata bahari. Pantai Banongan sebagai kawasan wisata bahari selayaknya harus berbasis kepada lingkungan, kultur masyarakat setempat serta nilai-nilai keagamaan. Dengan adanya program ini masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam setiap proses, termasuk dalam proses perekonomian.

Kedua, Perusda Banongan memerlukan mitra dalam mengembangkan program ekowisata berbasis lingkungan. Salah satu mitranya, masyarakat. Dengan adanya pola kemitraan antara Perusda Banongan dan masyarakat diharapkan menguatkan interaksi sosial, terjadi sikap kepedulian, dan partisipasi masyarakat dalam program ekowisata yang digagas pemerintah daerah yang dalam hal ini Perusda Banongan.

Ketiga, penduduk Banongan tergolong miskin dan termasuk daerah "rawan". Kawasan Banongan kurang mendapat perhatian pemerintah. Keempat, Kawasan Pantai Banongan termasuk Desa Binaan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Ibrahimy. Banongan termasuk lokasi pengabdian masyarakat para dosen dan mahasiswa Fakultas Dakwah IAI Ibrahimy. Dengan demikian, antara kami dengan masyarakat Banongan sudah terjalin komunikasi yang baik.

Menyusun Rencana Aksi Partisipatif

Pada tahapan ini tim merancang kegiatan sesuai dengan problem yang ditemukan dari hasil kajian wilayah bersama-sama dengan warga yang didasarkan atas kebutuhan mereka. Mekanisme ini diterapkan untuk mendorong pembelajaran bersama di antara anggota kelompok yang berkepentingan (*multi-stakeholder*) dalam program ini. Adapun teknik pelaksanaan langkah kedua ini adalah:

Pertemuan kelompok, sebagai mekanisme untuk merenung, membangun kelompok dan perencanaan bersama. Melalui forum ini, masing-masing pihak didorong untuk mengenali problem yang mereka hadapi dan difasilitasi untuk merumuskan sebuah formula solusi secara bersama-sama. Forum kelompok ini dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat untuk mendiskusikan persoalan-persoalan penting kemudian

mencari solusi untuk memecahkan masalah. *Benchmarking*; juga bagian dari mekanisme perenungan, membangun kelompok dan perencanaan bersama terhadap beberapa tantangan dan kendala yang ingin dipecahkan secara kolektif. Tentu saja dalam langkah sistem pembelajaran bersama, anggota tim peneliti memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam forum kegiatan.

Melaksanakan Aksi

Bentuk kegiatan aksi pada kegiatan dakwah pemberdayaan yaitu dakwah *bil qaul* (yang berupa halaqah) dan dakwah *bil hal* (yang berupa pelatihan praktis). Tujuan dalam tahapan ini, antara lain: Pertama, keterpaduan dan keselarasan antara upaya-upaya konservasi, pemberdayaan ekonomi, dan kepedulian terhadap nilai-nilai budaya lokal. Kedua, upaya peningkatan perekonomian melalui ekowisata bahari yang berbasis nilai-nilai keagamaan.

Pertama, setelah mengikuti halaqah ekowisata. Tujuan halaqah ini adalah supaya Jamaah Sholawat Nariyah di Kawasan Pantai Banongan memiliki wawasan dan pemahaman tentang program ekowisata yang dicanangkan Perusda Banongan. Di samping itu, supaya ada rumusan dan kesepakatan tentang ekowisata yang dikembangkan di Banongan yang terdapat keterpaduan dan keselarasan antara upaya-upaya konservasi, pemberdayaan ekonomi, dan kepedulian terhadap nilai-nilai budaya dan agama masyarakat Banongan. Wawasan dan pemahaman tersebut meliputi:

1. Mewujudkan Lingkungan Bersih dan Sehat Perspektif Islam
2. Peran Pesantren dalam Menciptakan Hidup Bersih
3. Pengembangan Ekowisata Bahari di Banongan
4. Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal
5. Pengembangan Ekowisata Berbasis Budaya Masyarakat Banongan

Kedua, halaqah kewirausahaan. Setelah mengikuti halaqah kewirausahaan ini Masyarakat memiliki pemahaman dan wawasan tentang jiwa kewirausahaan yang berlandaskan keagamaan, sehingga mereka siap berperan aktif dalam program ekowisata. Jamaah Sholawat Nariyah mendapatkan pengetahuan tentang

1. Motivasi dan Kewirausahaan
2. Kepribadian Wirausaha
3. Etika Wirausaha
4. Menjadi Wirausaha Muslim
5. Strategi dalam Membangun Wirausaha Muslim

Ketiga, halaqah fiqh praktis. Dengan mengikuti halaqah ini Masyarakat memiliki pemahaman tentang fiqh praktis yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jamaah Sholawat Nariyah mendapatkan ilmu teoritis dan praktis tentang:

1. Fiqh Thaharah
2. Fiqh Najasah
3. Tatacara Merawat Jenazah I
4. Tatacara Merawat Jenazah II
5. Dan praktik melalui Film Drama *Tazhijul Mayyit*

Keempat, pelatihan koperasi syariah. Dengan mengikuti pelatihan ini pengurus koperasi mempunyai keterampilan praktis tentang perencanaan keuangan dan akuntansi Syariah.

Kelima, deversikasi usaha. Dengan mengikuti kegiatan ini Masyarakat Banongan mendapatkan keterampilan praktis dengan memanfaatkan potensi yang terdapat di sekitar Pantai Banongan. Keterampilan di bidang ekonomi ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian masyarakat dengan memanfaatkan potensi alam Banongan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan kegiatan dakwah pemberdayaan ini, yang fokusnya dakwah *bil qaul* (halaqah) dan dakwah *bil hal* (keterampilan praktis) menghasilkan beberapa rumusan dan kesepakatan. Misalnya, terdapat keterpaduan dan keselarasan antara upaya-upaya konservasi, pemberdayaan ekonomi, dan kepedulian terhadap nilai-nilai budaya lokal; serta upaya peningkatan perekonomian melalui ekowisata bahari yang berbasis nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, terdapat perubahan yang signifikan pada Masyarakat untuk berperan aktif dan menjadi subyek dalam program ekowisata Pantai Banongan.

Pada kegiatan dakwah pemberdayaan ini, penting juga dilakukan evaluasi partisipatif yaitu memberi kesempatan bagi tim dan masyarakat untuk berhenti sejenak dan merefleksikan kegiatan yang telah lalu dengan tujuan untuk membuat keputusan langkah berikutnya. Masyarakat didorong dan didukung oleh tim untuk memikul tanggung jawab dan kontrol tentang: merencanakan apa yang akan dievaluasi (sasaran dan topik); bagaimana evaluasi akan dilakukan (teknik evaluasi); melaksanakan evaluasi; menganalisis informasi dan menyajikan hasil-hasil evaluasi.

Masyarakat secara intuitif dan informal mengevaluasi menurut objektif mereka sendiri atau objektif kelompok, karena: kegiatan masyarakat sering membutuhkan keterlibatan dan input dari anggota masyarakat. Pada

akhirnya merekalah yang memperoleh manfaatnya dan menanggung banyak biaya program. Masyarakat memilih apakah akan melanjutkan (atau tidak) kegiatan setelah kepergian tim. Jadi, tepat bila tim membantu masyarakat untuk melakukan evaluasi yang efektif. Berdasarkan hasil evaluasi, masyarakat dapat memilih untuk melanjutkan kegiatan, memodifikasi, mengubah strategi, mengubah objektif, atau menghentikan kegiatan.

Masyarakat mengharapkan prinsip keterlibatan secara langsung atas seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pariwisata yang dilakukan di Pantai Banongan. Produk ekowisata yang dikembangkan di Pantai Banongan yang digagas oleh Perusda Banongan harus dilandaskan pada kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Banongan. Ekowisata harus memperjuangkan prinsip perlunya usaha melindungi pengetahuan serta hak atas pemikiran dan karya intelektual masyarakat Banongan dari aktivitas pariwisata global, seperti teknologi, agama, tempat-tempat suci, sistem sosial dan kekerabatan, kehidupan tradisional, ekosistem, ekonomi, serta hak atas informasi.

Pengembangan ekowisata di Pantai Banongan harus mempertimbangkan, (1) pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan, (2) partisipasi aktif masyarakat Banongan, (3) penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, (4) dampak negatifnya harus ditekan seminimum mungkin, dan (5) memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan perekonomian Kabupaten Situbondo. Di samping itu, peran aktif kalangan akademisi dan pesantren, khususnya Fakultas Dakwah IAI Ibrahimiyah Situbondo yang bernaung di bawah Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo sangat diharapkan masyarakat Banongan.

Penutup

Ekowisata yang dikembangkan di Pantai Banongan Kabupaten Situbondo harus melibatkan masyarakat, memberi manfaat ekonomi, dan harus memperhatikan nilai-nilai kearifan masyarakat setempat yang penuh dengan nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, peningkatan kualitas hidup melalui dakwah pemberdayaan ekonomi amat signifikan

Kegiatan dakwah pemberdayaan ini, dapat difokuskan pada dakwah *bil qaul* (halaqah) dan dakwah *bil hal* (keterampilan praktis) yang dapat menghasilkan beberapa rumusan dan kesepakatan. Misalnya, terdapat keterpaduan dan keselarasan antara upaya-upaya konservasi, pemberdayaan ekonomi, dan kepedulian terhadap nilai-nilai budaya lokal; serta upaya

peningkatan perekonomian melalui ekowisata bahari yang berbasis nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, diharapkan terdapat perubahan dan peningkatan kualitas hidup yang signifikan pada masyarakat untuk berperan aktif dan menjadi subyek dalam program ekowisata Pantai Banongan.

Saran untuk pengembangan ekowisata di Pantai Banongan di antaranya, harus melibatkan masyarakat, memberi manfaat ekonomi, dan harus memperhatikan nilai-nilai kearifan masyarakat setempat yang penuh dengan nilai-nilai keagamaan. Mereka juga harus melibatkan stakeholder. []

Daftar Pustaka

- A. Halim, Paradigma Dakwah Pengembangan Masyarakat, dalam Moh Ali Aziz (ed), *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi*, Yogyakarta, LkiS, 2005.
- Dias Satria. Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Kabupaten Malang, *Journal of Indonesian Applied Economics*, 3, 37-47
- Khamami Zada, *Dakwah Transformatif: Mengantar Dai sebagai Pendamping Masyarakat*, www.nu.or.id, 2006
- Marpaung Happy, *Pengetahuan Kepariwisata*, Bandung: Alfabeta, 2000
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah
- Perusda, *Draft Ekowisata Pantai Firdaus Banongan Perusda Situbondo 2013*
- Sukardi, Implementasi Metodologi RRA dan PRA untuk Merancang Perubahan Berencana, dalam Moh Ali Aziz (ed), *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi*, Yogyakarta, LkiS, 2005
- Wardah Hafidz dan Wiladi Budiharga, Model Pemberdayaan Rakyat Berkeadilan Gender, dalam *Panduan Pendidikan Politik Bagi Perempuan*, Komite Perempuan Pro Demokrasi, Unair Surabaya, 1999